



**PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jl. Urip Sumohardjo No. 269
Makassar 90231

Phone : (0411) 453486
Instagram : bappelitbangdasulsel

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun 2020 dan Capaian Renstra-PD	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	23
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Usulan Masyarakat	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	36
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	39
BAB V PENUTUP	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun 2020	9
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun 2021	13
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel	22
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Selatan	28
Tabel 3.1	Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022	37
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel	38
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Selatan .	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-PD mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja-PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra-PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Penyusunan Renja-PD Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja dengan melalui 6 (enam) tahapan proses penyusunan Renja-PD, yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir, dan penetapan Renja-PD melalui peraturan Kepala Daerah. Program, kegiatan/sub kegiatan dan pagu indikatif yang termuat pada Renja-PD harus selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD begitu juga sebaliknya sehingga antara kedua dokumen dimaksud terdapat saling keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, menjadi babak baru bagi seluruh perangkat daerah di Sulawesi Selatan, termasuk Bappelitbangda Prov. Sulsel dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Nomenklatur yang semula hanya pada level Program dan Kegiatan, kini menjadi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Pengelolaan data perencanaan pembangunan yang semula menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD), kini harus berganti menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang disediakan oleh Kemendagri.

Penyusunan Renja-PD Bappelitbangda Tahun 2022 berpedoman pada Perubahan Renstra-PD Bappelitbangda Tahun 2018-2023 dan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun 2020 dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra-PD dan pada akhirnya Renja-PD digunakan sebagai dasar penyusunan RKA dan RAPBD Tahun Anggaran 2022.

1.2 Landasan Hukum

Renja-PD Bappelitbangda Tahun 2022 disusun sesuai dengan peraturan yang ditetapkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 164, Tambahan Lembaran Negara No. 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara No. 4438);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- h. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
- q. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- r. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);

- s. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Forum Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah (FPPID);
- t. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- u. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- v. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja-PD adalah untuk menjabarkan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 serta untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappelitbangda Prov. Sulsel di Tahun 2022 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbangda Prov. Sulsel secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Renja-PD adalah :

1. Sebagai acuan untuk penyusunan RKA Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
2. Menyediakan perencanaan tahunan yang konsisten, implementatif dan tolak ukur penilaian kinerja;
3. Sebagai sarana pengendalian program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja-PD Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja-PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja-PD, proses penyusunan Renja-PD, keterkaitan antara Renja-PD dengan dokumen RKPD, Renstra-PD Provinsi, dengan Renja K/L dan Renja Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Bappelitbangda Prov. Sulsel, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Bappelitbangda Prov. Sulsel.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja-PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja-PD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun 2021. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra-PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun 2020 dan realisasi Renstra-PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Adapun materi yang disajikan dalam bagian ini adalah penjelasan tentang realisasi program/kegiatan, factor-faktor penyebab ketercapaian target kinerja, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk menindaklanjuti factor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Prov. Sulsel serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel;
Diuraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Bappelitbangda Prov. Sulsel dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Bappelitbangda Prov. Sulsel;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Bappelitbangda Prov. Sulsel maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Bappelitbangda Prov. Sulsel dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Prov. Sulsel.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappelitbangda Prov. Sulsel yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bappelitbangda Prov. Sulsel.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Diantaranya pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian NSPK dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan.
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPd, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Bappelitbangda Prov. Sulsel dan nama dan tanda tangan kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel serta stempel pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Dalam penyusunan Renja-PD yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja-PD tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra-PD.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja-PD tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra-PD adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan/sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi. sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra-PD;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun 2020 dan Capaian Renstra-PD

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja-PD Tahun 2020 dan capaian Renstra-PD sampai dengan tahun 2021, terbagi dalam 2 periode sebagaimana terinci dalam tabel 2.1 dan 2.2 berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra-PD s/d Tahun 2020

(Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan - Berdasarkan Renstra Bappeda Tahun 2018-2023 dan Renstra Balitbangda Tahun 2018-2023)

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target program dan kegiatan (Renja PD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021		Keterangan				
						Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/7 * 100	10	11	12 = 11/10*100	13				
3.00																
Fungsi Penunjang Pemerintahan																
3.00	01															
Perencanaan Pembangunan																
3.00	01	01.00														
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah																
3.00	01	01.00	01		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (Prioritas)	%Ketersediaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang ditetapkan (Prioritas)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	
						% Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD dan APBD (Prioritas)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	
						% Rata-Rata Capaian Kinerja Program RPJMD (Prioritas)	%	99,00	97,00	97,50	97,50	100,00	-	-	98,48	
3.00	01	01.00	01	002	Penyusunan Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023	Jumlah Dokumen Perubahan RPJMD Prov. Sulsel yang disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah	Dokumen	1	-	1	1	100,00	-	-	-	-Kegiatan ini dimajukan tahun pelaksanaannya dan dimasukkan pada Perubahan Renja Tahun 2020 dan Proses pengesahan dokumen pada tahun 2021
3.00	01	01.00	01	003	Penyusunan Dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen RKPD yang tersusun dan ditetapkan menjadi Perkada	Dokumen	2	2	2	2	100,00	-	-	200,00	
3.00	01	01.00	01	005	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning)	Jumlah Aparatur Perencana OPD yang diberikan Pelatihan Penggunaan Sistem Informasi e-Planning	Orang	260	52	52	52	100,00	-	-	40,00	
						Jumlah Sistem Informasi e-Planning yang terpelihara, tersedia dan dimanfaatkan	Sistem	1	1	1	1	100,00	-	-	200,00	
						Jumlah Laporan Pemeliharaan Berkala e-Planning	Laporan	5	1	1	1	100,00	-	-	40,00	
3.00	01	01.00	01	007	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah validasi dan reliabel hasil rekonsiliasi data dan informasi dalam SIPD	Data	15.385	1.349	2.100	2.100	100,00	-	-	22,42	
3.00	01	01.00	01	009	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi dokumen RPJMD (Provinsi dan 24 Kab/Kota)	Dok	25	14	-	-	-	-	-	56,00	
						Jumlah dokumen hasil evaluasi dokumen RKPD (Provinsi Sulawesi Selatan dan 24 Kab/Kota)	Dok	125	25	25	27	108,00	-	-	41,60	
						Jumlah dokumen evaluasi RPJPD dengan RPJMN/RPJPD dan RTRWN/RTRWP	Dok	25	-	-	-	-	-	-	-	

BAB II - EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

3.00	01	01.00	01	010	Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran	Laporan	10	2	2	2	100,00	-	-	40,00	
3.00	01	01.00	01	022	Fasilitasi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan	Rekomendasi dan pertimbangan kepada Gubernur Sulawesi	dokumen	48	12	12	12	100,00	-	-	50,00	
3.00	01	01.00	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN BARU (Prioritas)	Jumlah Kawasan yang difasilitasi perencanaan dan pengembangannya (Prioritas)	Kawasan	6	3	3	3	100,00	-	-	100,00	
3.00	01	01.00	02	001	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah rekomendasi pengembangan pusat pertumbuhan baru	rekomendasi	20	4	4	4	100,00	-	-	40,00	
						Jumlah rekomendasi penyelenggaraan penataan ruang	rekomendasi	20	4	4	4	100,00	-	-	40,00	
3.00	01	01.00	02	002	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Ekonomi Baru dan Kawasan Khusus	Jumlah Laporan rencana pengembangan kawasan ekonomi baru dan kawasan ekonomi khusus	laporan	5	1	1	1	100,00	-	-	40,00	
3.00	01	01.00	03		PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan dalam Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rekomendasi	50	10	10	10	100,00	-	-	40,00	
3.00	01	01.00	03	002	Penyusunan Rencana Aksi Daerah / Sustainable Development Goals (SDGs)	Jumlah rencana aksi daerah Sustainable development Goals (SDGs) yang disusun	Rencana Aksi	24	26	24	26	108,33	-	-	216,67	
3.00	01	01.00	03	003	Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyusunan kebijakan program prioritas pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial	Dokumen	10	2	2	2	100,00	-	-	40,00	
3.00	01	01.00	03	004	Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat	Dokumen	10	2	2	2	100,00	-	-	40,00	
3.00	01	01.00	03	006	Penyusunan Kebijakan / Program Prioritas Pembangunan pendidikan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan program strategis pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga	Dokumen	10	2	2	2	100,00	-	-	40,00	
3.00	01	01.00	04		PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Dalam Bidang Perekonomian	Rekomendasi	40	8	8	8	100,00	-	-	40,00	
3.00	01	01.00	04	001	Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Dokumen Penanggulangan kemiskinan	Dokumen	5	1	1	1	100,00	-	-	40,00	
3.00	01	01.00	04	002	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Investasi, Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah Laporan perencanaan pengembangan investasi, penanaman modal dan PTSP	Laporan	5	1	1	1	100,00	-	-	40,00	
3.00	01	01.00	04	003	Koordinasi Pencapaian Indikator Makro	Jumlah Laporan capaian indikator makro	Laporan	5	1	1	1	100,00	-	-	40,00	
3.00	01	01.00	04	005	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Bidang Koperasi dan UKM	Jumlah Laporan perencanaan Pengembangan Bidang Koperasi dan UKM	Laporan	5	1	1	1	100,00	-	-	40,00	
3.00	01	01.00	04	009	Perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Laporan perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Sektor Kelautan dan Perikanan	Laporan	5	1	1	1	100,00	-	-	40,00	
3.00	01	01.00	04	010	Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Laporan perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	Laporan	5	1	1	1	100,00	-	-	40,00	

BAB II - EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

3.00	01	01.00	05		PROGRAM PERENCANAAN SUMBERDAYA ALAM	Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Perencanaan Pembangunan SDA ke dalam Dokumen Perencanaan	Rekomendasi	20	4	4	4	100,00	-	-	40,00
						Jumlah Rekomendasi Pembinaan teknis perencanaan pembangunan sumber daya alam	Rekomendasi	20	4	4	4	100,00	-	-	40,00
3.00	01	01.00	05	003	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi perencanaan pelaksanaan dan pengelolaan SDA dan LH	Laporan	10	2	2	2	100,00	-	-	40,00
3.00	01	01.00	06		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan ke dalam dokumen Perencanaan	Rekomendasi	20	4	4	4	100,00	-	-	40,00
						Jumlah Rekomendasi Pembinaan teknis Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	Rekomendasi	20	4	4	4	100,00	-	-	40,00
3.00	01	01.00	06	004	Koordinasi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah rekomendasi pembangunan jalan daerah terisolir	Rekomendasi	15	3	3	3	100,00	-	-	40,00
						Jumlah rekomendasi penyelenggaraan jalan dan jembatan	Rekomendasi	20	4	4	4	100,00	-	-	40,00
						Jumlah rekomendasi pengusulan DAK Bidang Jalan	Rekomendasi	15	3	3	3	100,00	-	-	40,00
3.00	01	01.00	06	005	Koordinasi Pelaksanaan Program IPDMIP	Jumlah rekomendasi kelembagaan KOMIR	Rekomendasi	10	2	2	2	100,00	-	-	40,00
						Jumlah rekomendasi penyelenggaraan PSETK	Rekomendasi	20	4	4	4	100,00	-	-	40,00
3.00	01	01.00	06	009	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Jumlah rekomendasi perencanaan sektor pengembangan wilayah	Laporan	16	3	3	3	100,00	-	-	37,50
3.00	01	01.00	06	010	Pengelolaan Jaringan Informasi Geospasial Provinsi	Jumlah sistem informasi Geospasial yg dikelola	Sistem	5	1	1	1	100,00	-	-	40,00
3.00	01	01.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan administrasi perkantoran	%	100	97	100	100	100,00	-	-	100,00
3.00	01	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik	Bulan	60	12	-	-	-	-	-	20,00
3.00	01	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	Unit	20	-	20	15	75,00	-	-	75,00
						Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	Unit	13	-	13	19	146,15	-	-	146,15
3.00	01	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Non PNS	Orang	30	25	84	336	400,00	-	-	1.203,33
3.00	01	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	Jenis ATK	25	25	25	45	180,00	-	-	280,00
3.00	01	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	Jenis	2	2	2	8	400,00	-	-	500,00
3.00	01	01.00	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	Pameran	5	1	-	-	-	-	-	20,00
3.00	01	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Kali	15.610	1.529	900	1.015	112,78	-	-	16,30
3.00	01	01.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	%	100	100	100	100	100,00	-	-	100,00
3.00	01	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	Unit	1	1	1	1	100,00	-	-	200,00
3.00	01	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	Unit	13	13	13	20	153,85	-	-	253,85
3.00	01	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Unit	60	13	12	11	91,67	-	-	40,00

BAB II - EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

3.00	01	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Unit	8	6	8	8	100,00	-	-	175,00	
3.00	01	01.00	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	Sistem informasi/Aplikasi	3	-	3	1	33,33	-	-	33,33	
						Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	Berita/Informasi	600	-	10	10	100,00	-	-	1,67	
3.00	01	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	%	100	100	100	101	101,00	-	-	101,00	
3.00	01	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	10	2	2	2	100,00	-	-	40,00	
						Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	Dokumen	20	4	4	10	250,00	-	-	70,00	
						Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	-	1	-	1	-	-	-	-	
						Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	Dokumen	20	7	7	8	114,29	-	-	75,00	
3.00	01	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Laporan	15	3	3	12	400,00	-	-	100,00	
3.00	01	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	%	100	100	100	100	100,00	-	-	100,00	
3.00	01	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	Laporan	20	4	4	4	100,00	-	-	40,00	
						Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya	Orang	150	141	192	209	108,85	-	-	233,33	
3.00	01	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Pasang	830	-	192	198	103,13	-	-	23,86	
3.00	04				Penelitian dan Pengembangan											
3.00	04	01.00	01		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI INOVASI PEMERINTAHAN (Prioritas)	% Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi daerah (Prioritas)	%	20	20	20	20	100,00			100,00	
3.00	04	01.00	01	003	Penguatan Kluster Inovasi	Jumlah Produk Komoditas Unggulan Daerah	Produk	25	4	5	5	100,00	-	-	36,00	
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penguatan Kluster Inovasi	Rekomendasi	5	1	1	1	100,00	-	-	40,00	
3.00	04	01.00	01	008	Pengembangan Riset pada Stasiun Litbang Teknologi Perikanan dan Kelautan Balitbangda Prov. Sulsel	Jumlah Data dan Informasi Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	rekomendasi	5	1	1	2	200,00	-	-	60,00	
3.00	04	01.00	01	009	Laboratorium Inovasi	Persentase Kebijakan Inovasi di Daerah	%	100	-	60	60	100,00	-	-	60,00	
						Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	100	20	20	20	100,00	-	-	40,00	
3.00	04	01.00	01	014	Revitalisasi Kebun Raya Pucak	Jumlah Kebun Raya	Kebun Raya	1	1	1	1	100,00	-	-	200,00	
3.00	04	01.00	02		PROGRAM KELITBANGAN DAN PEMANFAATAN IPTEK DAERAH	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil Kelitbangan dan pemanfaatan iptek daerah	Rekomendasi	45	9	9	8	88,89	-	-	37,78	
3.00	04	01.00	02	002	Pemeliharaan Benih Eksplorasi dan Tanaman Koleksi	Jumlah Spesies Benih Hasil Eksplorasi	Spesies	250	50	-	-	-	-	-	20,00	
						Jumlah Pemeliharaan Tanaman Koleksi	pohon	1.850	100	150	150	100,00	-	-	13,51	

BAB II - EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

x	xx	01	1.01	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Layanan Jasa Administrasi Keuangan terdiri dari: - Supervisi SPJ Bulanan - SPP/SPM Kegiatan - SPP/SPM Gaji	Dokumen Kegiatan Dokumen	12 17 14	- - -	- - -	- - -	12 17 14	3 0 3	0,00 25,00		
x	xx	01	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yg tersusun	Laporan	36	-	-	-	-	12	3	25,00	
x	xx	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	100,00	-	-	-	-	100,00	00,00	00,00	
x	xx	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan kebutuhan Barang Milik Daerah	Laporan RKBMD	6	-	-	-	-	2	0	0,00	
x	xx	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	9	-	-	-	-	3	0	00,00	
x	xx	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	Rata-rata	100	-	-	-	-	100	25	25,00	
x	xx	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	Pasang	625	-	-	-	-	200	0	0,00	
x	xx	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang dikelola administrasi kepegawaiannya	pegawai	625	-	-	-	-	200	50	25,00	
x	xx	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prosentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatiha kepegawaian berdasarkan tugas & fungsi	persen	100	-	-	-	-	100	25,00	25,00	
x	xx	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Pegawai	625	-	-	-	-	200	0	0,00	
x	xx	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan kebutuhan administrasi perangkat daerah	Persen	100,00	-	-	-	-	100,00	20	20,00	
x	xx	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik atau penerangan yang tersedia	Unit	36	-	-	-	-	12	13	108,33	
x	xx	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Unit	36	-	-	-	-	12	16	133,33	
x	xx	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/ Material	Prosentase ketersediaan bahan/material untuk pameran	Persen	100,00	-	-	-	-	100,00	0,00	0,00	
x	xx	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Orang	730	-	-	-	-	300	75	25,00	
x	xx	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Kali	180	-	-	-	-	60	72	120,00	
x	xx	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100,00	-	-	-	-	100,00	8	8,33	
x	xx	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Jenis Pengadaan aset tak berwujud	Jenis	1	-	-	-	-	1	0	0,00	
x	xx	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	% ketersediaan gedung kantor atau bangunan lainnya	%	100,00	-	-	-	-	100,00	0,00	0,00	
x	xx	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	% ketersediaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	%	100,00	-	-	-	-	100,00	25,00	25,00	
x	xx	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100,00	-	-	-	-	100,00	25,00	25,00	
x	xx	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah ketersediaan jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	-	-	-	-	12	3	25,00	
x	xx	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ketersediaan jasa pelayanan umum kantor	Tahun	1	-	-	-	-	1	0	0,00	
x	xx	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100,00	-	-	-	-	100,00	21,88	21,8	

BAB II - EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

x	xx	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	Unit	16	-	-	-	-	16	10	62,50	
						Jumlah pajak kendaraan dinas/ kendaraan dinas jabatan roda 2 yang terbayarkan	Unit	12	-	-	-	-	12	1	8,33	
						Jumlah pajak kendaraan dinas/ kendaraan dinas jabatan roda 4 yang terbayarkan	Unit	4	-	-	-	-	4	7	175,00	
x	xx	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	Unit	4	-	-	-	-	4	0	0,00	
						Jumlah pajak kendaraan operasional roda 2 yang terbayarkan	Unit	3	-	-	-	-	2	2	100,00	
						Jumlah pajak kendaraan operasional roda 4 yang terbayarkan	Unit	2	-	-	-	-	1	3	300,00	
x	xx	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah jenis aset tak berwujud yang terpelihara	Jenis	1	-	-	-	-	1	0	0,00	
x	xx	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara	Gedung	2	-	-	-	-	2	1	50,00	
x	xx	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	Jenis	10	-	-	-	-	10	10	100,00	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	% Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD dan APBD	Persen	100,00	-	-	-	-	100,00	0,00	0,00	
						% peningkatan capaian kinerja program	Persen	0,50	-	-	-	-	0,50	0,00	0,00	
5	01	02	1.01		Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	% Kesesuaian perencanaan dan pendanaan dengan dokumen pelaksanaan pembangunan	Persen	100,00	-	-	-	-	100,0	0,00	0,00	
5	01	02	1.01		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Usulan Perencanaan & Pendanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	10	-	-	-	-	1	0	0,00	
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan	Dokumen	11	-	-	-	-	2	0	0,00	
5	01	02	1.02		Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketersediaan dokumen data dan Informasi yang telah dianalisis untuk perencanaan pembangunan	%	100,00	-	-	-	-	100,00	0,00	0,00	
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi pembangunan daerah dalam SIPD	Data	15.385	-	-	-	-	2077	0	0,00	
						Jumlah sistem yang dipelihara	Sistem	2	-	-	-	-	2	0	0,00	
						Jumlah kab/kota yang dibina	Kab/Kota	24	-	-	-	-	24	0	50,00	
5	01	02	1.03		Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan	% Kesesuaian hasil evaluasi pembangunan dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100,00	-	-	-	-	100,00	0,00	0,00	
						Jumlah Rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah	Kab/Kota	24	-	-	-	-	24	0	0,00	
5	01	02	1.03	01	Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian/Evaluasi Dokumen RPJMD	Dokumen	1	-	-	-	-	1	1	100,00	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian/Evaluasi Dokumen RKPD	Dokumen	1	-	-	-	-	1	1	100,00	
						Jumlah Rekomendasi kepada Gubernur Sulawesi Selatan	Dokumen	36	-	-	-	-	12	3	25,00	
5	01	02	1.03	03	Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Triwulan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan	Laporan	4	-	-	-	-	4	1	25,00	
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (24 Kab/Kota)	Laporan	4	-	-	-	-	4	1	25,00	
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan DAK (24 Kab/Kota)	Laporan	4	-	-	-	-	4	1	25,00	

BAB II - EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

5	01	02	1.03	04	fasilitasi/ evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/ kota	Jumlah Fasilitas (rekomendasi) Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Perencanaan	Rekomendasi	24	-	-	-	-	24	0	0,00
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	% Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang PPM	Persen	100,00	-	-	-	-	60,00	0,00	0,00
						% Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Ekonomi dan SDA	Persen	95,00	-	-	-	-	80,00	0,00	0,00
						% Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	95,00	-	-	-	-	90,00	0,00	0,00
5	01	03	1.01		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan	Rekomendasi	15	-	-	-	-	5	0	0,00
						Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	Rekomendasi	21	-	-	-	-	7	0	0,00
						Jumlah Data dan Informasi Perencanaan dan hasil monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Data dan Informasi	24	-	-	-	-	8	0	0,00
5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rekomendasi	3	-	-	-	-	1	0	0,00
5	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen	3	-	-	-	-	1	0	0,00
5	01	03	1.01	04	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	Jumlah rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	Rekomendasi	12	-	-	-	-	4	0	0,00
5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	Rekomendasi	9	-	-	-	-	3	0	0,00
5	01	03	1.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen penyusunan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDG's	Dokumen	3	-	-	-	-	1	0	0,00
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	6	-	-	-	-	1	0	0,00
5	01	03	1.01	08	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan Manusia	Jumlah rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Rekomendasi	12	-	-	-	-	4	0	0,00
5	01	03	1.02		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian	Rekomendasi	21	-	-	-	-	7	0	0,00
						Jumlah Data dan Informasi perencanaan dan hasil monitoring dan evaluasi bidang perekonomian dan SDA	Rekomendasi	33	-	-	-	-	11	0	0,00
						Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang SDA	Data dan Informasi	30	-	-	-	-	10	0	0,00

BAB II - EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian(RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rekomendasi	9	-	-	-	-	3	0	0,00	
5	01	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen	12	-	-	-	-	4	0	0,00	
5	01	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian	Jumlah rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	Rekomendasi	12	-	-	-	-	4	0	0,00	
5	01	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rekomendasi	18	-	-	-	-	6	0	0,00	
5	01	03	1.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan SDA	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan daerah bidang Pembangunan SDA	Dokumen	12	-	-	-	-	4	0	50,00	
5	01	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	Jumlah rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang SDA	Rekomendasi	15	-	-	-	-	5	0	0,00	
5	01	03	1.03		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Wilayah	Rekomendasi	6	-	-	-	-	6	0	0,00	
						Jumlah Data dan Informasi perencanaan dan hasil monitoring dan evaluasi bidang infrastruktur dan wilayah	Data dan Informasi	25	-	-	-	-	25	0	0,00	
						Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur	Rekomendasi	6	-	-	-	-	6	0	0,00	
5	01	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur(RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rekomendasi	3	-	-	-	-	3	0	0,00	
5	01	03	1.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen	3	-	-	-	-	3	0	0,00	
5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur	Jumlah rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur	Rekomendasi	3	-	-	-	-	3	0	0,00	
5	01	03	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	Rekomendasi	3	-	-	-	-	3	0	0,00	
5	01	03	1.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Wilayah	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan daerah bidang Wilayah	Dokumen	3	-	-	-	-	3	0	0,00	
5	01	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Wilayah	Jumlah rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang Wilayah	Rekomendasi	3	-	-	-	-	3	0	0,00	

5		05		Penelitian dan Pengembangan												
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	% Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah	Persen	9,00	-	-	-	-	3,00	0,00	0,00	
5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rekomendasi	11	-	-	-	-	2	0	0,00	
5	05	02	1.01	02	Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Rekomendasi	6	-	-	-	-	1	0	0,00	
5	05	02	1.01	14	Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	Rekomendasi	3	-	-	-	-	1	0	0,00	
5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rekomendasi	12	-	-	-	-	1	0	0,00	
5	05	02	1.02	06	Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan	Jumlah Rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan	Rekomendasi	3	-	-	-	-	1	0	0,00	
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rekomendasi	1	-	-	-	-	1	0	0,00	
5	05	02	1.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rekomendasi	1	-	-	-	-	1	0	0,00	
5	05	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan, Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Rekomendasi	5	-	-	-	-	1	0	0,00	
5	05	02	1.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Rekomendasi	6	-	-	-	-	2	0	0,00	
5	05	02	1.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Rekomendasi	1	-	-	-	-	1	0	0,00	
5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Perangkat Daerah yang mengembangkan Inovasi dan Teknologi	OPD	33	-	-	-	-	11	0	0,00	
5	05	02	1.04	01	Penelitian dan Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian, pengembangan dan perekayasa bidang teknologi dan inovasi	Rekomendasi	3	-	-	-	-	1	0	0,00	
						Jumlah demplot Marine Aquaculture yang dibangun	demplot	1	-	-	-	-	1	0	0,00	
5	05	02	1.04	03	Diseminasi jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah jenis inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang didiseminasikan	Jenis	3	-	-	-	-	3	0	0,00	
5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil hasil kelitbangan	Jumlah penelitian yang disosialisasikan	penelitian	21	-	-	-	-	7	0	0,00	
5	05	02	1.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah hak kekayaan intelektual yang difasilitasi dn didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM	Produk	9	-	-	-	-	2	0	0,00	

Sumber : eplanning.sulselprov.go.id/monev

Berikut penjelasan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja-PD dan pencapaian Renstra-PD Bappelitbangda Prov. Sulsel:

1. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra-PD sampai dengan Tahun 2020.

Merupakan realisasi atas Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2020 yang didasarkan pada Renstra Bappeda Tahun 2018-2023 dan Renstra Balitbangda Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tercantum pada Perubahan Renja-PD Tahun 2020, telah ditetapkan 12 (dua belas) Program, dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Prioritas), dengan capaian kinerja sebesar **100%**.
- b. Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru (Prioritas), dengan capaian kinerja sebesar **100%**.
- c. Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan capaian kinerja sebesar **100%**.
- d. Program Perencanaan Perekonomian, dengan capaian kinerja sebesar **100%**.
- e. Program Perencanaan Sumberdaya Alam, dengan capaian kinerja sebesar **100%**.
- f. Program Perencanaan Infrastruktur dan kewilayahan, dengan capaian kinerja sebesar **100%**.
- g. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan capaian kinerja sebesar **100%**.
- h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan capaian kinerja sebesar **100%**.
- i. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja, dengan capaian kinerja sebesar **100%**.
- j. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan capaian kinerja sebesar **100%**.
- k. Program Pengembangan dan Implementasi Inovasi Pemerintahan, dengan capaian kinerja sebesar **100%**.
- l. Program Kelitbang dan Pemanfaatan IPTEK Daerah, dengan capaian kinerja sebesar **88,89%**. Program ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan Kajian Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pembangunan Sulawesi Selatan pada kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Sulawesi Selatan tidak dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat jangka waktu penelitian sehingga pelaksanaannya dialihkan di tahun 2021 yang disertai dengan penambahan anggaran,

Sedangkan untuk Target program dan kegiatan Renja-PD Tahun 2021 serta Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD sampai dengan Tahun 2021, tidak terisi hal ini dikarenakan adanya perbedaan nomenklatur program/kegiatan. Untuk Tahun 2020 mengacu Renstra-PD Tahun 2018-2023 sedangkan nomenklatur program/kegiatan Tahun 2021 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan untuk Tahun 2021 merupakan tahun transisi perubahan Renstra-PD Tahun 2018-2023.

2. Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra-PD sampai dengan Tahun 2021.

Pada tabel tersebut terlihat hanya berisi Target Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Renja-PD Tahun 2021 serta Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD sampai dengan Tahun 2021 yang telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pada Tahun 2021 terdapat 4 (empat) program dan 9 (sembilan) indikator program yang ditetapkan, dengan rincian capaian kinerja sampai dengan tahun berjalan (Triwulan 1 Tahun 2021) sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- *Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD dan APBD*

Target : 100%, realisasi : 0%, capaian (0%)

- *Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Program*

Target : 0,5% realisasi : 0%, capaian (0%)

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- *Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang PPM*

Target : 60%, realisasi : 0%, capaian (0%)

- *Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Ekonomi dan SDA*

Target : 80% realisasi : 0%, capaian (0%)

- *Persentase Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*

Target : 90% realisasi : 0%, capaian (0%)

- c. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - *Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah*
Target : 3% realisasi : 0%, capaian (0%)
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - *Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah*
Target : 100%, realisasi : 10%, capaian (10%)
 - *Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Minimal Baik*
Target : 100% realisasi : 25%, capaian (25%)
 - *Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP*
Target : 100% realisasi : 0%, capaian (0%)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Bappelitbangda adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kewenangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dalam Peraturan Daerah tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat Bappeda berubah nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang disingkat Bappelitbangda sebagai hasil penggabungan OPD Bappeda dan Balitbangda. Selanjutnya ditegaskan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Analisis kinerja pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra-PD Tahun 2018-2023. Untuk mewujudkan visi dan misi Provinsi Sulawesi Selatan serta mencapai tujuan Perangkat Daerah, ditetapkan sasaran kinerja yang merupakan pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja sebagai suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Pengukuran target kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Dikarenakan penggabungan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat beberapa penambahan indikator sasaran Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2020 dengan indikator sasaran Tahun 2019.

BAB II - EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Bappelitbangda Prov. Sulsel memiliki 11 (sebelas) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian 6 (enam) sasaran strategis Bappelitbangda Prov. Sulsel. Pada tahun 2020, persentase capaian sasaran kinerja sebesar **104,18%** dengan 2 (dua) indikator kinerja yang tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu :

- ✓ *Prosentase penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD dengan capaian sebesar 96%.*

Hal tersebut dikarenakan terjadinya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah yang mengarahkan untuk penggabungan Perangkat Daerah, sehingga mengakibatkan beberapa program rutin yang dimiliki oleh Perangkat Daerah yang tergabung menjadi tidak terpakai.

- ✓ *Prosentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) minimal 75% dengan capaian sebesar 98%.*

Terdapat 101 (seratus satu) Program Prioritas yang capaian hasilnya mencapai minimal 75% dari 112 (seratus dua belas) program prioritas. Hal tersebut dikarenakan terjadinya *refocussing* anggaran, sehingga mengakibatkan terdapatnya beberapa program yang tidak mencapai target kinerja.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel secara rinci dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	TW I 2021	2022	2023	
Urusan Perencanaan												
1.	Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)			94%	95%	96%	97%	99,1%	17%	96%	97%	Disesuaikan dengan Perubahan Renstra Bappelitbangda Tahun 2018-2023
	Nilai SAKIP OPD			80%	80%	81%	83%	80%	0%	81%	83%	Disesuaikan dengan Perubahan Renstra Bappelitbangda Tahun 2018-2023
	% Temuan Material			0,06%	0,06%	0,06%	0,05%	0,06%	0%	0,06%	0,05%	Disesuaikan dengan Perubahan Renstra Bappelitbangda Tahun 2018-2023
	% ASN Nilai SKP Kategori Baik			100%	-	-	-	100%	-	-	-	Berdasarkan Renstra Bappeda Tahun 2018-2023
2.	Tingkat konsistensi program RPJMD kedalam RKPD			-	100%	100%	100%	-	0%	100%	100%	Disesuaikan dengan Perubahan Renstra Bappelitbangda Tahun 2018-2023

BAB II - EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

	Tingkat konsistensi program RKPd kedalam APBD			-	100%	100%	100%	-	0%	100%	100%	Disesuaikan dengan Perubahan Renstra Bappelitbangda Tahun 2018-2023
	Prosentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) minimal 75%			92%	92,5%	92,5%	93%	90%	0%	92,5%	93%	Disesuaikan dengan Perubahan Renstra Bappelitbangda Tahun 2018-2023
	Prosentase penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPd	100%	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-	Berdasarkan Renstra Bappeda Tahun 2018-2023
	Prosentase penjabaran konsistensi program RKPd kedalam APBD	100%	100%	-	-	-	96%	-	-	-	-	Berdasarkan Renstra Bappeda Tahun 2018-2023
3.	Prosentase kesesuaian prioritas pembangunan Sulawesi Selatan			-	100%	100%	100%	-	0%	100%	100%	Disesuaikan dengan Perubahan Renstra Bappelitbangda Tahun 2018-2023
	Prosentase kesesuaian prioritas pembangunan			100%	-	-	-	100%	-	-	-	Berdasarkan Renstra Bappeda Tahun 2018-2023
4.	Prosentase kesesuaian perencanaan pembangunan dengan RTRW	100%	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-	Berdasarkan Renstra Bappeda Tahun 2018-2023
Urusan Penelitian dan Pengembangan												
1.	Prosentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan untuk Inovasi daerah			-	-	20%	30%	-	0%	30%	40%	Disesuaikan dengan Perubahan Renstra Bappelitbangda Tahun 2018-2023
2.	Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi Daerah			20%	-	-	-	28%	-	-	-	Berdasarkan Renstra Balitbangda Tahun 2018-2023
3.	Jumlah kebijakan hasil kelitbangan dan pemanfaatan iptek daerah			9 rekomendasi	-	-	-	10 rekomendasi	-	-	-	Berdasarkan Renstra Balitbangda Tahun 2018-2023
4.	Nilai SAKIP OPD			80%	-	-	-	-	-	-	-	Berdasarkan Renstra Balitbangda Tahun 2018-2023
	Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah			100%	-	-	-	-	-	-	-	Berdasarkan Renstra Balitbangda Tahun 2018-2023
	Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik			100%	-	-	-	-	-	-	-	Berdasarkan Renstra Balitbangda Tahun 2018-2023

Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2020

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah hasil penggabungan antara Bappeda dan Balitbangda, tentunya dengan kedudukan, fungsi dan urusan pemerintahan yang diselenggarakan, secara umum Bappelitbangda Prov. Sulsel memiliki intensitas beban kerja dan tugas yang bertambah serta lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab terhadap kepada Gubernur, Bappelitbangda Prov. Sulsel dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah yang profesional, yang dapat mengakomodir

pembangunan dalam berbagai aspek, yang terwujud dalam kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, penyusunan dokumen perencanaan dan pembinaan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah. Terkait hal tersebut, Bappelitbangda Prov. Sulsel memiliki fungsi strategis dalam proses pembangunan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi Provinsi Sulawesi Selatan sehingga target pembangunan Daerah dapat tercapai.

Berdasarkan analisis, dinamika peraturan perundang-undangan dan perkembangan dinamika pembangunan maka dapat diidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi Bappelitbangda Prov. Sulsel dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, antara lain:

1. Ketersediaan data/informasi terkini yang belum akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan disebabkan masih lemahnya manajemen data, dan perbedaan sumber data/informasi;
2. Terjadinya refofusing anggaran sebagai dampak dari penanganan pandemic covid 19 sehingga alokasi dana untuk pembangunan tidak maksimal;
3. Belum optimalnya hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran;
4. Hasil evaluasi dan data/informasi yang tersedia belum dijadikan rujukan utama dalam perencanaan selanjutnya;
5. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas SDM demi pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
6. Belum optimalnya penguasaan metodologi dan analisis bagi Pejabat Fungsional Perencana maupun Pejabat Fungsional Peneliti/Perekayasa;
7. Pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian belum optimal dijadikan acuan perumusan perencanaan/kebijakan pembangunan daerah untuk menjawab permasalahan program pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan;

Permasalahan dan hambatan tersebut diatas baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah. selaras dengan program nasional, dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Selanjutnya dalam meningkatkan kinerja pelayanan, Bappelitbangda Prov. Sulsel menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

- a. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas SDM dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- b. Tingginya tuntutan penyusunan dokumen perencanaan yang semakin berkualitas dan konsisten dengan penganggaran, diantaranya menyediakan dokumen RKPD Provinsi dalam rangka untuk meraih nominasi kategori terbaik ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang dilaksanakan setiap tahun;
- c. Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran;
- d. Terdapat perbedaan kebijakan pusat (antar Kementerian) terkait dengan penyusunan perencanaan, penelitian dan pengembangan serta evaluasi daerah;
- e. Dinamika Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait Perencanaan Pembangunan Daerah.

Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis, diantaranya terbitnya Permendagri Nomor 70 dan 90 Tahun 2019 menuntut SDM Bappelitbangda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan mengimplementasikan perkembangan regulasi tersebut.

- f. Belum tersedianya data base penelitian dan pengembangan yang akurat dan terkini untuk mendukung kebutuhan data/informasi yang cepat dan akurat guna kepentingan penelitian dan pengembangan dalam menindaklanjuti isu-isu aktual dan strategis.

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi Bappelitbangda Prov. Sulsel dalam melaksanakan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, antara lain:

- 1) Terjalinnnya koordinasi mulai dari perencanaan, monitoring dan evaluasi serta penelitian dan pengembangan dengan leading sector;
- 2) Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang berkualitas guna mempermudah koordinasi dan monitoring perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelitbangda;
- 4) Regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan, penelitian dan inovasi.

Berdasarkan hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan, permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel, maka

diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Bappelitbangda Prov. Sulsel sebagai berikut :

- a) Pengoptimalan penyediaan data/informasi yang berkualitas dan pengoptimalan hasil kajian penelitian dan pengembangan;
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c) Peningkatan konsistensi (RPJMD/RKPD) dengan Pemerintah Pusat (RPJMN/RKP) maupun dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) Kabupaten/Kota;
- d) Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra-PD dan Renja-PD) serta dokumen penganggaran (RKA/DPA dan APBD);
- e) Penyempurnaan integrasi aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (*e-Planning*) maupun sistem informasi Perencanaan Pembangunan lainnya (*e-Budgeting* dan *e-RKBMD*), yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sesuai amanat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 sehingga tercapai konsistensi dan transparansi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- f) Peningkatan fungsi kelembagaan, kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan;
- g) Peningkatan kapasitas penguasaan metodologi dan analisis bagi Pejabat Fungsional Perencana, Pejabat Fungsional Peneliti/Perekayasa dan staf Bappelitbangda Prov. Sulsel melalui kegiatan workshop dan FGD;
- h) Mengharapkan dukungan anggaran minimal 1% dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan mekanisme kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai Permendagri RI Nomor 17 Tahun 2016 sehingga diharapkan dapat menghasilkan rumusan rekomendasi kebijakan yang berkualitas untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.
- i) Pengoptimalan penanganan pemulihan pasca Pandemi Covid-19 dan dampaknya.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2022 Prov. Sulsel merupakan rujukan bagi penyusunan Renja-PD. Review dan telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 Prov. Sulsel dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan

dan sub kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Bappelitbangda Prov. Sulsel berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2022 Prov. Sulsel.

Berdasarkan hasil telaahan yang telah dilakukan, maka tidak ada perbedaan program dan kegiatan/ sub kegiatan antara rancangan awal RKPD Tahun 2022 Prov. Sulsel dengan hasil analisis kebutuhan Bappelitbangda Prov. Sulsel pada Tahun 2022, sedangkan untuk kebutuhan pagu anggaran berbeda (berkurang) dibandingkan pagu indikatif rancangan awal RKPD Tahun 2022 Prov. Sulsel karena disesuaikan dengan keputusan hasil rapat pembahasan anggaran Tahun 2022 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada tanggal 28 Juni 2021, yang secara rinci disajikan dalam tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Selatan

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	44.724.749.308,35	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	37.151.913.573,00	
			% ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%				% ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%		
			% Penurunan Temuan berdasarkan LHP	100%				% Penurunan Temuan berdasarkan LHP	100%		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100%	872.674.629,35	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100%	648.577.100,00	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun dan ditetapkan	2 dokumen	210.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun dan ditetapkan	2 dokumen	170.917.200,00	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	4 dokumen	190.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Makassar	Jumlah dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	4 dokumen	135,468,000,00	
1.3	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah dokumen evaluasi PD yang tersusun	8 Laporan	472.674.629,35	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kota Makassar	Jumlah dokumen evaluasi PD yang tersusun	8 Laporan	342.191.900,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	38.283.781.907,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Makassar	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	30.610.405.320,00	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	100%	37.781.347.247,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Makassar	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	100%	30.160.405.320,00	
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	Layanan Jasa Administrasi Keuangan terdiri dari: - Supervisi SPJ Bulanan - SPP/ SPM Kegiatan - SPP/SPM Gaji	12 Dokumen 17 Kegiatan 14 dokumen	381.226.736,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Makassar	Layanan Jasa Administrasi Keuangan terdiri dari: - Supervisi SPJ Bulanan - SPP/ SPM Kegiatan - SPP/SPM Gaji	12 Dokumen 17 Kegiatan 14 dokumen	350.000.000,00	
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Tahun SKPD	Kota Makassar	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	12 laporan	121.207.924,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Tahun SKPD	Kota Makassar	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	12 laporan	100.000.000,00	
3	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah		% Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan	100%	129.741.524,00	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah		% Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan	100%	129.741.524,00	
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar	Jumlah laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 laporan RKBMD	18.021.500,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Makassar	Jumlah laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 laporan RKBMD	18.021.500,00	
3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah laporan barang milik daerah Perangkat Daerah	3 Laporan	111.720.024,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Makassar	Jumlah laporan barang milik daerah Perangkat Daerah	3 Laporan	111.720.024,00	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	100	629.828.048,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	100	629.828.048,00	
4.1	Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Kota Makassar	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	210 pasang	188.936.500,00	Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Kota Makassar	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	210 pasang	188.936.500,00	

BAB II - EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Makassar	Jumlah pegawai yang dikelola administrasi kepegawaianya	210 pegawai	134.189.024,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Makassar	Jumlah pegawai yang dikelola administrasi kepegawaianya	210 pegawai	134.189.024,00
4.3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Prosentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi	100%	173.592.324,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Makassar	Prosentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi	100%	173.592.324,00
4.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	210 pegawai	133.110.200,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Makassar	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	210 pegawai	133.110.200,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100%	1.740.979.308,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100%	1.833.041.309,00
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar	Jumlah komponen instalasi listrik atau penerangan yang tersedia	12 unit	150.054.524,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Makassar	Jumlah komponen instalasi listrik atau penerangan yang tersedia	12 unit	150.054.524,00
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	12 unit	153.956.336,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Makassar	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	12 unit	153.956.336,00
5.3	Penyediaan Bahan/Material	Kota Makassar	Prosentase ketersediaan bahan/material untuk pameran	100%	135.777.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Kota Makassar	Prosentase ketersediaan bahan/material untuk pameran	100%	135.777.000,00
5.4	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Makassar	Jumlah tamu yang difasilitasi	350 orang	304.995.024,00	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Makassar	Jumlah tamu yang difasilitasi	350 orang	304.995.024,00
5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan	70 kali	996.196.424,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Makassar	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan	70 kali	993.253.449,00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.080.565.700,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.080.565.700,00
6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	2 kendaraan roda dua	80.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	2 kendaraan roda dua	80.000.000,00
6.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	1 kendaraan dinas roda dua	40.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Makassar	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	1 kendaraan dinas roda dua	40.000.000,00
6.3	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar	Jumlah jenis pengadaan aset tak berwujud	1 jenis	108.509.100,00	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar	Jumlah jenis pengadaan aset tak berwujud	1 jenis	108.509.100,00
6.4	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar	persentase ketersediaan gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	158.629.000,00	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar	persentase ketersediaan gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	158.629.000,00
6.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kota Makassar	persentase ketersediaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	693.427.600,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kota Makassar	persentase ketersediaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	693.427.600,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	24.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	24.000.000,00
7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar	Jumlah ketersediaan jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	19.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Makassar	Jumlah ketersediaan jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	19.000.000,00
7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Barru	Jumlah ketersediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Tahun	5.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Barru	Jumlah ketersediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Tahun	5.000.000,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%	1.963.178.192,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%	2.195.754.572,00
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar dan Kab. Barru	Jumlah kendaraan jabatan/ dinas yang dipelihara	16 unit	490.106.024,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Makassar dan Kab. Barru	Jumlah kendaraan jabatan/ dinas yang dipelihara	16 unit	490.106.024,00
Jumlah pajak kendaraan dinas/ kendararaan dinas jabatan roda 2 yang terbayarkan			12 unit	Jumlah pajak kendaraan dinas/ kendararaan dinas jabatan roda 2 yang terbayarkan				12 unit		
Jumlah pajak kendaraan dinas/ kendararaan dinas jabatan roda 4 yang terbayarkan			4 unit	Jumlah pajak kendaraan dinas/ kendararaan dinas jabatan roda 4 yang terbayarkan				4 unit		

BAB II - EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Kota Makassar dan Kab. Barru	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	4 unit	192.877.524,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Kota Makassar dan Kab. Barru	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	4 unit	192.877.524,00
			Jumlah pajak kendaraan dinas operasional roda 2 yang terbayarkan	2 unit				Jumlah pajak kendaraan dinas operasional roda 2 yang terbayarkan	2 unit	
			Jumlah pajak kendaraan dinas operasional roda 4 yang terbayarkan	2 unit				Jumlah pajak kendaraan dinas operasional roda 4 yang terbayarkan	2 unit	
8.8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar	Jumlah jenis aset tak berwujud yang terpelihara	1 jenis	162.771.024,00	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Makassar	Jumlah jenis aset tak berwujud yang terpelihara	1 jenis	162.771.024,00
8.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Makassar dan Kab. Barru	Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara	2 gedung	672.535.596,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Makassar dan Kab. Barru	Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara	2 gedung	750.000.000,00
8.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar dan Kab. Barru	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	10 jenis	444.888.024,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Makassar dan Kab. Barru	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	10 jenis	600.000.000,00
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (prioritas)		% Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD & APBD	100%	14.591.598.156,00	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (prioritas)		% Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD & APBD	100%	12.397.363.300,00
			Persentase peningkatan capaian kinerja program	0,5%				Persentase peningkatan capaian kinerja program	0,5%	
9	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		% Kesesuaian perencanaan program dan pendanaan dengan dokumen APBD	100%	3.112.745.848,00	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		% Kesesuaian perencanaan program dan pendanaan dengan dokumen APBD	100%	2.543.627.800,00
9.1	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Usulan Perencanaan & Pendanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	651.708.524,00	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Usulan Perencanaan & Pendanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	356.330.000,00
9.2	Koordinasi penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan	2 Dokumen	2.461.037.324,00	Koordinasi penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan	2 Dokumen	2.187.297.800,00
10	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		% Ketersediaan dokumen data dan Informasi yang telah dianalisis untuk perencanaan pembangunan	100%	390.984.024,00	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		% Ketersediaan dokumen data dan Informasi yang telah dianalisis untuk perencanaan pembangunan	100%	233.839.000,00
10,1	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Kota Makassar	Jumlah data dan informasi pembangunan daerah dalam SIPD	2077	390.984.024,00	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Kota Makassar	Jumlah data dan informasi pembangunan daerah dalam SIPD	2077	233.839.000,00
			Jumlah sistem yang dipelihara	2 sistem				Jumlah sistem yang dipelihara	2 sistem	
			Jumlah Aparatur Perencana OPD yang diberikan Pelatihan Penggunaan SIPD	52 Orang				Jumlah Aparatur Perencana OPD yang diberikan Pelatihan Penggunaan SIPD	52 Orang	
11	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		% Kesesuaian hasil evaluasi pembangunan dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	11.087.868.284,00	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		% Kesesuaian hasil evaluasi pembangunan dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	9.619.896.500,00
			Persentase Rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah	100%				Persentase Rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah	100%	
11.1	Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di provinsi	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian/Evaluasi RPJPD dengan RPJMN	0	9.430.173.224,00	Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di provinsi	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian/Evaluasi RPJPD dengan RPJMN	0	8.300.000.000,00
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian/Evaluasi Dokumen RPJMD	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian/Evaluasi Dokumen RPJMD	1 Dokumen	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian/Evaluasi Dokumen RKPD	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian/Evaluasi Dokumen RKPD	1 Dokumen	
			Jumlah Rekomendasi kepada Gubernur Sulawesi	12 dokumen				Jumlah Rekomendasi kepada Gubernur Sulawesi	12 dokumen	

BAB II - EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

11.2	Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan Triwulan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan	4 Laporan	1.151.889.036,00	Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Kota Makassar	Jumlah Laporan Triwulan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan	4 Laporan	990.071.500,00
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (24 Kab/Kota)	4 Laporan				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (24 Kab/Kota)	4 Laporan	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan DAK (24 Kab/Kota)	4 Laporan				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan DAK (24 Kab/Kota)	4 Laporan	
11.3	fasilitasi/ evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/ kota	Kota Makassar	Jumlah Fasilitas (rekomendasi) Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Perencanaan	24 rekomendasi	505.806.024,00	fasilitasi/ evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/ kota	Kota Makassar	Jumlah Fasilitas (rekomendasi) Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Perencanaan	24 rekomendasi	505.806.024,00
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		% Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang PPM	80%	1.975.716.218,63	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		% Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang PPM	80%	1.427.242.400,00
			% Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Ekonomi dan SDA	90%	1.877.983.219,20			% Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Ekonomi dan SDA	90%	1.457.151.412,00
			% Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Wilayah	90%	5.015.818.495,69			% Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Wilayah	90%	6.602.471.076,00
					8.869.517.933,52					9.486.864.888,00
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Makassar	Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan	5 Rekomendasi	1.975.716.218,63	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Makassar	Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan	5 Rekomendasi	1.427.242.400,00
			Jumlah Data dan Informasi perencanaan dan hasil monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Jumlah data dan informasi				Jumlah Data dan Informasi perencanaan dan hasil monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Jumlah data dan informasi	
			Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	7 Rekomendasi				Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	7 Rekomendasi	
12.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Kota Makassar	Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Rekomendasi	210.000.000,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Kota Makassar	Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Rekomendasi	156.131.300,00
12.2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	193.960.100,00	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	193.960.100,00
12.3	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan		Jumlah Rekomendasi Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan	4 Rekomendasi	341.000.000,00	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan		Jumlah Rekomendasi Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan	4 Rekomendasi	300.000.000,00
12.4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Kota Makassar	Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Rekomendasi	602.000.000,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Kota Makassar	Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Rekomendasi	300.859.000,00
12.5	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals	1 Dokumen	418.756.118,63	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Makassar	Jumlah Dokumen Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals	1 Dokumen	266.292.000,00
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Dokumen				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Dokumen	

BAB II - EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

12.6	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Kota Makassar	Jumlah Rekomendasi Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia	4 Rekomendasi	210.000.000,00	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Kota Makassar	Jumlah Rekomendasi Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia	4 Rekomendasi	210.000.000,00
13	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA		Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian	7 Rekomendasi	653.031.196,40	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA		Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian	7 Rekomendasi	1.457.151.412,00
			Jumlah Data dan Informasi perencanaan dan hasil monitoring dan evaluasi bidang perekonomian dan SDA	10 Jumlah Data dan Informasi	428.064.256,40					
			Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang SDA	11 Rekomendasi	796.887.766,40					
13.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Kota Makassar	Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	3 Rekomendasi	205.416.213,20	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Kota Makassar	Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	3 Rekomendasi	178.751.500,00
13.2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kota Makassar	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang Perekonomian	4 Dokumen	211.207.383,20	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kota Makassar	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang Perekonomian	4 Dokumen	183.876.200,00
13.3	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian	Kota Makassar	Jumlah Rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian	4 Rekomendasi	447.614.983,20	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian	Kota Makassar	Jumlah Rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian	4 Rekomendasi	395.318.700,00
13.4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD dan RKPd)	Kota Makassar	Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	6 Rekomendasi	207.491.913,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD danRKPd)	Kota Makassar	Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	6 Rekomendasi	180.638.500,00
13.5	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pembangunan SDA	Kota Makassar	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang SDA	4 Dokumen	216.856.873,00	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pembangunan SDA	Kota Makassar	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang SDA	4 Dokumen	190.742.612,00
13.6	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	Kota Makassar	Jumlah Rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	5 Rekomendasi	589.395.853,00	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	Kota Makassar	Jumlah Rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	5 Rekomendasi	327.823.900,00
14	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur	6 rekomendasi	3.710.972.284,37	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur	6 rekomendasi	6.602.471.076,00
			Jumlah Data dan Informasi perencanaan dan hasil monitoring dan evaluasi bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	25 data dan informasi	340.000.000,00					
			Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang kewilayahan	6 rekomendasi	964.846.211,32					
14.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Kota Makassar	Jumlah Rekomendasi penyusunan dokumen perencanaan bidang Infrastruktur	3 rekomendasi	350.000.000,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Kota Makassar	Jumlah Rekomendasi penyusunan dokumen perencanaan bidang Infrastruktur	3 rekomendasi	247.519.976,00

BAB II - EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

14.2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Makassar	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang Bidang Infrastruktur	3 dokumen	200.000.000,00	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Makassar	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang Bidang Infrastruktur	3 dokumen	161.621.100,00
14.3	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur	Kota Makassar	Jumlah Rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur	3 rekomendasi	3.360.972.284,37	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur	Kota Makassar	Jumlah Rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur	3 rekomendasi	5.368.363.00,00
14.4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Kota Makassar	Jumlah Rekomendasi penyusunan dokumen perencanaan bidang kewilayahan	3 rekomendasi	465.000.000,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Kota Makassar	Jumlah Rekomendasi penyusunan dokumen perencanaan bidang kewilayahan	3 rekomendasi	244.354.100,00
14.5	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Makassar	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang kewilayahan	3 dokumen	140.000.000,00	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kota Makassar	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang kewilayahan	3 dokumen	140.000.000,00
14.6	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan	Kota Makassar	Jumlah Rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan	3 rekomendasi	499.846.211,32	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan	Kota Makassar	Jumlah Rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan	3 rekomendasi	440.612.900,00
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		% Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah	3%	6.405.000.000,00	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		% Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah	3%	6.320.000.000
15	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	3 rekomendasi	1.250.000.000,00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	3 rekomendasi	1.250.000.000,00
15.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kota Makassar	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah	1 Rekomendasi	225.000.000,00	Fasilitasi, Pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kota Makassar	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah	1 Rekomendasi	225.000.000,00
15.2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Pemerintahan Umum	Kota Makassar	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Rekomendasi	750.000.000,00	Fasilitasi, Pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Pemerintahan Umum	Kota Makassar	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Rekomendasi	750.000.000,00
15.3	Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	Kota Makassar	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	1 Rekomendasi	275.000.000,00	Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	Kota Makassar	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	1 Rekomendasi	275.000.000,00
16	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	4 rekomendasi	1.175.000.000,00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	4 rekomendasi	1.050.000.000,00
16.1	Penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	Kota Makassar	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	1 Rekomendasi	300.000.000,00	Penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	Kota Makassar	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	1 Rekomendasi	300.000.000,00
16.2	Penelitian dan Pengembangan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Makassar	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Rekomendasi	275.000.000,00	Penelitian dan pengembangan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Makassar	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Rekomendasi	275.000.000,00

BAB II - EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

16.3	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kota Makassar	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Rekomendasi	275.000.000,00	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kota Makassar	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Rekomendasi	150.000.000,00	
16.4	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Rekomendasi	325.000.000,00	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kota Makassar	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Rekomendasi	325.000.000,00	
17	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	7 rekomendasi	1.830.000.000,00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	7 rekomendasi	1.540.000.000,00	
17.1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kota Makassar dan Kab. Barru	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 rekomendasi	150.000.000,00	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kota Makassar dan Kab. Barru	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 rekomendasi	150.000.000,00	
17.2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kota Makassar dan Kab. Barru	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 rekomendasi	450.000.000,00	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kota Makassar dan Kab. Barru	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 rekomendasi	300.000.000,00	
17.3	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kota Makassar dan Kab. Barru	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2 rekomendasi	580.000.000,00	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kota Makassar dan Kab. Barru	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2 rekomendasi	580.000.000,00	
17.4	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Kota Makassar dan Kab. Barru	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	2 rekomendasi	400.000.000,00	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Kota Makassar dan Kab. Barru	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	2 rekomendasi	260.000.000,00	
17.5	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kota Makassar dan Kab. Barru	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 rekomendasi	250.000.000,00	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kota Makassar dan Kab. Barru	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 rekomendasi	250.000.000,00	
18	Pengembangan inovasi dan teknologi		Jumlah Perangkat Daerah yang mengembangkan inovasi dan teknologi	11 OPD	2.150.000.000	Pengembangan inovasi dan teknologi		Jumlah Perangkat Daerah yang mengembangkan inovasi dan teknologi	11 OPD	1.480.000.000,00	
18.1	Penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Kota Makassar	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan bidang teknologi dan inovasi	1 rekomendasi	550.000.000,00	Penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Kota Makassar	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan bidang teknologi dan inovasi	1 rekomendasi	250.000.000,00	
			Jumlah demplot Marine Aquaculture yang dipelihara	1 demplot				Jumlah demplot Marine Aquaculture yang dipelihara	1 demplot		
18.2	Uji coba dan penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kota Makassar	Jumlah rekomendasi hasil difusi inovasi dan penerapan teknologi	1 rekomendasi	40.000.000,00	Uji coba dan penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kota Makassar	Jumlah rekomendasi hasil difusi inovasi dan penerapan teknologi	1 rekomendasi	40.000.000,00	
18.3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif	Kota Makassar	Jumlah jenis inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang didiseminasikan	3 jenis	300.000.000,00	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif	Kota Makassar	Jumlah jenis inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang didiseminasikan	3 jenis	300.000.000,00	
18.4	Sosialisasi dan diseminasi hasil- hasil kelitbang	Kota Makassar	Jumlah penelitian yang disosialisasikan	7 penelitian	325.000.000,00	Sosialisasi dan diseminasi hasil- hasil kelitbang	Kota Makassar	Jumlah penelitian yang disosialisasikan	7 penelitian	250.000.000,00	
			Jumlah edisi media litbang	1 edisi				Jumlah edisi media litbang	1 edisi		
18.5	fasilitasi hak kekayaan intelektual	Kota Makassar	Jumlah hak kekayaan intelektual yang difasilitasi dan didaftarkan ke kementerian Hukum dan HAM	3 produk	935.000.000,00	fasilitasi hak kekayaan intelektual		Jumlah hak kekayaan intelektual yang difasilitasi dan didaftarkan ke kementerian Hukum dan HAM	3 produk	640.000.000,00	
TOTAL					74.590.865.397,87	TOTAL					64.356.141.761,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bappelitbangda Prov. Sulsel tidak secara langsung menampung atau mengakomodir program dan kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Bappelitbangda Prov. Sulsel maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan hasil musrenbang kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan musrenbang RKPD Prov. Sulsel Tahun 2021 tidak ada masukan usulan program dan kegiatan/sub kegiatan masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2020–2024, arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2020, kebijakan pembangunan tahun 2021, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Tema RKP Tahun 2022 juga disusun sebagai respons terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2022, dan sekaligus menyiapkan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020–2024.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 adalah “*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*”, dan ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

- Prioritas Nasional 1:** *Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan*
- Prioritas Nasional 2:** *Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan*
- Prioritas Nasional 3:** *Meningkatkan sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing*
- Prioritas Nasional 4:** *Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan*
- Prioritas Nasional 5:** *Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar*
- Prioritas Nasional 6:** *Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim*
- Prioritas Nasional 7:** *Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik*

Untuk mewujudkan tema RKP Tahun 2022 maka sasaran pembangunan nasional tahun 2022 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19 sebagaimana pada tabel 3.1 berikut

Tabel 3.1 Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022

No.	Indikator Pembangunan	Target
a	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4 - 6,0
b	Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 - 9,0
c	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,24 - 5,52
d	Rasio Gini (indeks)	3,76 – 3,78
e	Indeks Pembangunan Manusia (nilai)	73,74 – 73,48
f	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	26,8 - 27,1
g	Pertumbuhan PDB Industri Pengolah NonMigas (%)	5,8 – 6,5
h	Kontribusi PDB Pariwisata (%)	4,3

Sumber : Rancangan Akhir RKPD Prov. Sulsel Tahun 2022

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Sulawesi Selatan Tahun 2022 yang merupakan tahun keempat RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, serta dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Prov. Sulsel yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kewenangan daerah, maka dukungan Bappelitbangda Prov. Sulsel dalam pencapaian arah kebijakan Nasional Tahun 2022 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan ke dalam dokumen Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2022 yang sejalan dengan kebijakan Nasional dan prioritas nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, serta dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintah yang bersih serta mampu bersaing dalam bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, maka Bappelitbanghda Prov. Sulsel harus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Adapun perubahan-perubahan tersebut disusun dengan melalui tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *outcome* dan *output*. Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan

wajib, urusan pilihan maupun urusan penunjang dalam mendukung pelaksanaan misi dan mewujudkan visi pembangunan daerah Tahun 2018-2023.

Tujuan dan sasaran Bappelitbangda Prov, Sulsel merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode RPJMD 2018-2023 adalah **“Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”**.

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Kelima pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 yaitu provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”.

Adapun tujuan dan sasaran dalam Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2022 adalah turunan penjabaran dari Perubahan Renstra Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2018-2023 yang akan dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun dan didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan Bappelitbangda Prov. Sulsel adalah sebagaimana tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel

Urusan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1. Perencanaan	1. Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi dokumen perencanaan)	96%
			Nilai SAKIP OPD	81%
			Persentase Temuan Material	0,06%
	2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan bersinergi	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Tingkat konsistensi program RPJMD kedalam RKPd	100%
			Tingkat konsistensi program RKPd kedalam APBD	96,5%
			Prosentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75%	92,5%
Prosentase kesesuaian prioritas pembangunan Sulawesi Selatan			100%	
2. Penelitian dan Pengembangan		Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbang	Prosentase hasil kelitbang yang dimanfaatkan untuk Inovasi Daerah	30%

Sumber : Perubahan Renstra Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2018-2023

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2022 mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Pencapaian Visi Dan Misi Gubernur Sulawesi Selatan

Dalam rangka pencapaian Visi Dan Misi Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023, maka Bappelitbangda menjabarkan dan mengoperasionalkan visi dan misi kepala daerah dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah dan yang disesuaikan dengan Perubahan Renstra Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2018-2023.

2. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's)

Sebagai komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan secara nasional dan global seperti diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), maka Bappelitbangda Prov. Sulsel telah menindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 - 2023.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan ini sebagai perwujudan peranan aktif dalam pencapaian sasaran-sasaran global sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi

3. Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial

Kemiskinan telah menjadi isu global yang terjadi saat ini, sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 bahwa tujuan globalnya adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Hal ini sejalan dengan upaya Bappelitbangda untuk meningkatkan sinergitas perencanaan penanganan kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial ekonomi di Sulawesi Selatan akibat krisis pandemi Covid-19 yang melanda..

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan tahunan. Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan/sub kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan namun juga sumber pendanaan lainnya (APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2022 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Renstra-PD yang mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Bappelitbangda dalam menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan daerah.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2022 yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbangda Prov. Sulsel, terdiri dari 2 urusan, 4 program, 18 kegiatan dan 70 sub kegiatan dengan total pendanaan sebesar **Rp. 64.356.141.761,-** diuraikan secara rinci pada Tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Provinsi Sulawesi Selatan**

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				64.356.141.761,00				79.302.718.103,00
5.01	PERENCANAAN				59.036.141.761,00				72.310.218.103,00
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	% Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%		37.151.913.573,00			100%	46.730.021.529,80
		% ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%					100%	
		% Penurunan Temuan berdasarkan LHP	100%					100%	
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100%		648.577.100,00			100%	1.058.956.216,00
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun dan ditetapkan	2 dokumen	Kota Makassar	170.917.200,00	PAD Prov, Sulsel		2 dokumen	250.000.000,00
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	4 dokumen	Kota Makassar	135.468.000,00	PAD Prov, Sulsel		4 dokumen	270.564.753,00
5.01.01.1.01.07	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi PD yang tersusun	8 Laporan	Kota Makassar	342.191.900,00	PAD Prov, Sulsel		8 Laporan	538.391.463,00
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%		30.610.405.320,00			100%	39.571.058.941,00
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjagannya	100%	Kota Makassar	30.160.405.320,00	PAD Prov, Sulsel		100%	39.141.058.941,00
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Layanan Jasa Administrasi Keuangan terdiri dari : - Supervisi SPJ Bulanan - SPP/ SPM Kegiatan - SPP/SPM Gaji	- 12 Dokumen - 17 Kegiatan - 14 dokumen	Kota Makassar	350.000.000,00	PAD Prov, Sulsel		- 12 Dokumen - 17 Kegiatan - 14 dokumen	300.000.000,00
5.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 laporan	Kota Makassar	100.000.000,00	PAD Prov, Sulsel		1 laporan	130.000.000,00
5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	% Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan	100%		129.741.524,00			100%	130.000.000,00
5.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 laporan RKBMD	Kota Makassar	18.021.500,00	PAD Prov, Sulsel		2 laporan RKBMD	60.000.000,00
5.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah Perangkat Daerah	3 Laporan	Kota Makassar	111.720.024,00	PAD Prov, Sulsel		3 Laporan	70.000.000,00

BAB IV – RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	100		629.828.048,00			100	692.810.852,00
5.01.01.1.05.02	Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	210 pasang	Kota Makassar	188.936.500,00	PAD Prov, Sulsel		215 pasang	207.830.150,00
5.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang dikelola administrasi kepegawaiannya	210 pegawai	Kota Makassar	134.189.024,00	PAD Prov, Sulsel		215 pegawai	147.607.926,00
5.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prosentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepegawaian berdasarkan tugas dan fungsi	100%	Kota Makassar	173.592.324,00	PAD Prov, Sulsel		100%	190.951.556,00
5.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	210 pegawai	Kota Makassar	133.110.200,00	PAD Prov, Sulsel		215 pegawai	146.421.220,00
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100%		1.833.041.309,00			100%	1.915.077.238,00
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik atau penerangan yang tersedia	12 unit	Kota Makassar	150.054.524,00	PAD Prov, Sulsel		12 unit	165.059.976,00
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	12 unit	Kota Makassar	153.956.336,00	PAD Prov, Sulsel		12 unit	169.351.970,00
5.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Prosentase ketersediaan bahan/material untuk pameran	100%	Kota Makassar	135.777.000,00	PAD Prov, Sulsel		100%	149.354.700,00
5.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	350 orang	Kota Makassar	304.995.024,00	PAD Prov, Sulsel		380 orang	335.494.526,00
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koodinasi dan konsultasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan	70 kali	Kota Makassar	993.253.449,00	PAD Prov, Sulsel		80 kali	1.095.816.066,00
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		1.080.565.700,00			100%	1.136.622.270,00
5.01.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	2 kendaraan roda dua	Kota Makassar	80.000.000,00	PAD Prov, Sulsel		2 kendaraan roda dua	80.000.000,00
5.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	1 kendaraan dinas roda dua	Kota Makassar	40.000.000,00	PAD Prov, Sulsel			0,00
5.01.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah jenis pengadaan aset tak berwujud	1 jenis	Kota Makassar	108.509.100,00	PAD Prov, Sulsel		1 jenis	119.360.010,00
5.01.01.1.07.09	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	persentase ketersediaan gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	Kota Makassar	158.629.000,00	PAD Prov, Sulsel		100%	174.491.900,00
5.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	persentase ketersediaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	Kota Makassar	693.427.600,00	PAD Prov, Sulsel		100%	762.770.360,00
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		24.000.000,00			100%	190.500.000,00
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah ketersediaan jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Kota Makassar	19.000.000,00	PAD Prov, Sulsel		12 bulan	180.000.000,00
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ketersediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Tahun	Kab. Barru	5.000.000,00	PAD Prov, Sulsel		1 Tahun	10.500.000,00
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%		2.195.754.572,00			100%	2.164.996.011,20
5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah kendaraan jabatan/ dinas yang dipelihara Jumlah pajak kendaraan dinas/ kendararaan dinas jabatan roda 2 yang terbayarkan	16 unit 12 uni	Kota Makassar dan	490.106.024,00	PAD Prov, Sulsel		16 unit 12 uni	539.116.626,00

BAB IV – RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pajak kendaraan dinas/ kendararaan dinas jabatan roda 4 yang terbayarkan	4 uni	Kab. Barru				4 uni	
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	4 unit	Kota Makassar dan Kab. Barru	192.877.524,00	PAD Prov, Sulsel		4 unit	212.165.276,00
		Jumlah pajak kendaraan dinas operasional roda 2 yang terbayarkan	2 unit					2 unit	
		Jumlah pajak kendaraan dinas operasional roda 4 yang terbayarkan	2 unit					2 unit	
5.01.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah jenis aset tak berwujud yang terpelihara	1 jenis	Kota Makassar	162.771.024,00	PAD Prov, Sulsel		1 jenis	179.048.126,00
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara	2 gedung	Kota Makassar dan Kab. Barru	750.000.000,00	PAD Prov, Sulsel		2 gedung	745.789.156,00
5.01.01.1.07.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	10 jenis	Kota Makassar dan Kab. Barru	600.000.000,00	PAD Prov, Sulsel		10 jenis	489.376.826,00
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (prioritas)	% Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD & APBD	100%		12.397.363.300,00			100%	15.713.198.815,00
		Persentase peningkatan capaian kinerja program	0,5%			0,5%			
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	% Kesesuaian perencanaan program dan pendanaan dengan dokumen APBD	100%		2.543.627.800,00			100%	3.512.745.848,00
5.01.02.1.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya	Jumlah Dokumen Usulan Perencanaan & Pendanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Kota Makassar	356.330.000,00	PAD Prov, Sulsel		1 Dokumen	951.708.524,00
5.01.02.1.06	Koordinasi penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan	2 Dokumen	Kota Makassar	2.187.297.800,00	PAD Prov, Sulsel		2 Dokumen	2.561.037.324,00
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketersediaan dokumen data dan Informasi yang telah dianalisis untuk perencanaan pembangunan	100%		233.839.000,00			100%	430.984.024,00
5.01.02.1.02.01	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah data dan informasi pembangunan daerah dalam SIPD	2077	Kota Makassar	233.839.000,00	PAD Prov, Sulsel		2077	430.984.024,00
		Jumlah sistem yang dipelihara	2 sistem					2 sistem	
		Jumlah kab/kota yang dibina	24 Kab/Kota					24 Kab/Kota	
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	% Kesesuaian hasil evaluasi pembangunan dengan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Kota Makassar	9.619.896.500,00			100%	11.769.468.943,00
		Persentase Rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah	100%				100%		
5.01.02.1.03.01	Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian/Evaluasi RPJPD dengan RPJMN	0	Kota Makassar	8.300.000.000,00	PAD Prov, Sulsel		1 Dokumen	9.530.173.224,00
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian/Evaluasi Dokumen RPJMD	1 Dokumen					1 Dokumen	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian/Evaluasi Dokumen RPKD	1 Dokumen					1 Dokumen	

BAB IV – RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

		Jumlah Rekomendasi kepada Gubernur Sulawesi	12 dokumen					12 dokumen	
5.01.02.1.03.03	Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Triwulan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan	4 Laporan	Kota Makassar	990.071.500,00	PAD Prov, Sulsel		4 Laporan	1.633.489.695,00
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (24 Kab/Kota)	4 Laporan					4 Laporan	
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan DAK (24 Kab/Kota)	4 Laporan					4 Laporan	
5.01.02.1.03.04	fasilitasi/ evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/ kota	Jumlah Fasilitas (rekomendasi) Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Perencanaan	24 rekomendasi	Kota Makassar	505.806.024,00	PAD Prov, Sulsel		24 rekomendasi	605.806.024,00
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	% Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang PPM	80%		1.427.242.400,00			100%	2.195.716.219,00
		% Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Ekonomi dan SDA	90%		1.457.151.412,00			95%	2.065.781.542,00
		% Kesesuaian program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	90%		6.602.471.076,00			95%	5.475.000.000,00
					9.486.864.888,00				9.736.497.761,00
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan	5 Rekomendasi		1.427.242.400,00			5 Rekomendasi	2.195.716.219,00
		Jumlah Data dan Informasi perencanaan dan hasil monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Jumlah data dan informasi					8 Jumlah data dan informasi	
		Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	7 Rekomendasi					7 Rekomendasi	
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Rekomendasi	Kota Makassar	156.131.300,00	PAD Prov, Sulsel		1 Rekomendasi	250.000.000,00
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen	Kota Makassar	193.960.100,00	PAD Prov, Sulsel		1 Dokumen	213.960.100,00
5.01.03.1.01.04	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	Jumlah Rekomendasi Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan	4 Rekomendasi	Kota Makassar	300.000.000,00	PAD Prov, Sulsel		4 Rekomendasi	361.000.000,00
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Rekomendasi	Kota Makassar	300.859.000,00	PAD Prov, Sulsel		3 Rekomendasi	622.000.000,00
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals	1 Dokumen	Kota Makassar	266.292.000,00	PAD Prov, Sulsel		1 Dokumen	498.756.119,00

BAB IV – RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

	Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Dokumen					2 Dokumen	
5.01.03.1.01.08	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Jumlah Rekomendasi Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia	4 Rekomendasi	Kota Makassar	210.000.000,00	PAD Prov, Sulsel		4 Rekomendasi	250.000.000,00
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian	7 Rekomendasi		1.457.151.412,00			7 Rekomendasi	2.065.781.542,00
		Jumlah Data dan Informasi perencanaan dan hasil monitoring dan evaluasi bidang perekonomian dan SDA	10 Jumlah Data dan Informasi			10 Jumlah Data dan Informasi			
		Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang SDA	11 Rekomendasi			11 Rekomendasi			
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	3 Rekomendasi	Kota Makassar	178.751.500,00	PAD Prov, Sulsel		3 Rekomendasi	225.957.835,00
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang Perekonomian	4 Dokumen	Kota Makassar	183.876.200,00	PAD Prov, Sulsel		4 Dokumen	232.328.122,00
5.01.03.1.02.04	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian	Jumlah Rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian	4 Rekomendasi	Kota Makassar	395.318.700,00	PAD Prov, Sulsel		4 Rekomendasi	492.376.482,00
5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rekomendasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	6 Rekomendasi	Kota Makassar	180.638.500,00	PAD Prov, Sulsel		6 Rekomendasi	228.241.105,00
5.01.03.1.02.07	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pembangunan SDA	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang SDA	4 Dokumen	Kota Makassar	190.742.612,00	PAD Prov, Sulsel		4 Dokumen	238.542.561,00
5.01.03.1.02.08	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	Jumlah Rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	5 Rekomendasi	Kota Makassar	327.823.900,00	PAD Prov, Sulsel		5 Rekomendasi	648.335.439,00
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur	6 rekomendasi		6.602.471.076,00			6 rekomendasi	5.475.000.000,00
		Jumlah Data dan Informasi perencanaan dan hasil monitoring dan evaluasi bidang Infrastruktur dan Wilayah	25 data dan informasi			25 data dan informasi			
		Jumlah Rekomendasi hasil pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang kewilayahan	6 rekomendasi			6 rekomendasi			
5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rekomendasi penyusunan dokumen perencanaan bidang Infrastruktur	3 rekomendasi	Kota Makassar	247.519.976,00	PAD Prov, Sulsel		3 rekomendasi	400.000.000,00

BAB IV – RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang Bidang Infrastruktur	3 dokumen	Kota Makassar	161.621.100,00	PAD Prov, Sulsel		3 dokumen	210.000.000,00
5.01.03.1.03.04	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur	3 rekomendasi	Kota Makassar	5.368.363.00,00	PAD Prov, Sulsel		3 rekomendasi	3.950.000.000,00
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Rekomendasi penyusunan dokumen perencanaan bidang kewilayahan	3 rekomendasi	Kota Makassar	244.354.100,00	PAD Prov, Sulsel		3 rekomendasi	475.000.000,00
5.01.03.1.03.07	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi bidang kewilayahan	3 dokumen	Kota Makassar	140.000.000,00	PAD Prov, Sulsel		3 dokumen	140.000.000,00
5.01.03.1.03.08	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan	Jumlah Rekomendasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan	3 rekomendasi	Kota Makassar	440.612.900,00	PAD Prov, Sulsel		3 rekomendasi	300.000.000,00
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				5.320.000.000,00				6.992.500.000,00
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	% Perangkat Daerah yang mendapatkan penghargaan inovasi daerah	3%		5.320.000.000,00			3%	6.992.500.000,00
5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	3 rekomendasi		1.250.000.000,00			4 rekomendasi	1.380.000.000,00
5.05.02.1.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah	1 Rekomendasi	Kota Makassar	225.000.000,00	PAD Prov, Sulsel		1 Rekomendasi	225.000.000,00
5.05.02.1.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Pemerintahan Umum	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	2 Rekomendasi	Kota Makassar	750.000.000,00	PAD Prov, Sulsel		2 Rekomendasi	880.000.000,00
5.05.02.1.01.14	Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	1 Rekomendasi	Kota Makassar	275.000.000,00	PAD Prov, Sulsel		1 Rekomendasi	275.000.000,00
5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	4 rekomendasi		1.050.000.000,00			4 rekomendasi	1.512.500.000,00
5.05.02.1.02.01	Penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	1 Rekomendasi	Kota Makassar	300.000.000,00	PAD Prov, Sulsel		1 Rekomendasi	440.000.000,00
5.05.02.1.02.02	Penelitian dan pengembangan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian dan pengembangan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Rekomendasi	Kota Makassar	275.000.000,00	PAD Prov, Sulsel		1 Rekomendasi	275.000.000,00
5.05.02.1.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Rekomendasi	Kota Makassar	150.000.000,00	PAD Prov, Sulsel		1 Rekomendasi	385.000.000,00
5.05.02.1.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Rekomendasi	Kota Makassar	325.000.000,00	PAD Prov, Sulsel		1 Rekomendasi	412.500.000,00

BAB IV – RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	7 rekomendasi		1.540.000.000,00			5 rekomendasi	1.530.000.000,00
5.05.02.1.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 rekomendasi	Kab, Barru	150.000.000,00	PAD Prov, Sulsel			0,00
5.05.02.1.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 rekomendasi	Kab, Barru	300.000.000,00	PAD Prov, Sulsel			0,00
5.05.02.1.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2 rekomendasi	Kab, Barru	580.000.000,00	PAD Prov, Sulsel		2 rekomendasi	880.000.000,00
5.05.02.1.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	2 rekomendasi	Kab, Barru	260.000.000,00	PAD Prov, Sulsel		2 rekomendasi	400.000.000,00
5.05.02.1.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 rekomendasi	Kab, Barru	250.000.000,00	PAD Prov, Sulsel		1 rekomendasi	250.000.000,00
5.05.02.1.04	Pengembangan inovasi dan teknologi	Jumlah Perangkat Daerah yang mengembangkan inovasi dan teknologi	11 OPD		1.480.000.000,00			11 OPD	2.570.000.000,00
5.05.02.1.04.01	Penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan bidang teknologi dan inovasi	1 rekomendasi	Kota Makassar	250.000.000,00	PAD Prov, Sulsel		1 rekomendasi	550.000.000,00
		Jumlah demplot Marine Aquaculture yang dipelihara	1 demplot					1 demplot	
5.05.02.1.04.02	Uji coba dan penerapan Rancang Bangun/ Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah rekomendasi hasil difusi inovasi dan penerapan teknologi	1 rekomendasi	Kota Makassar	40.000.000,00	PAD Prov, Sulsel		1 rekomendasi	400.000.000,00
5.05.02.1.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif	Jumlah jenis inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang didiseminasikan	3 jenis	Kota Makassar	300.000.000,00	PAD Prov, Sulsel		3 jenis	300.000.000,00
5.05.02.1.04.04	Sosialisasi dan diseminasi hasil- hasil kelitbangan	Jumlah penelitian yang disosialisasikan	7 penelitian	Kota Makassar	250.000.000,00	PAD Prov, Sulsel		7 penelitian	385.000.000,00
5.05.02.1.04.05	Fasilitasi hak kekayaan intelektual	Jumlah hak kekayaan intelektual yang difasilitasi dan didaftarkan ke kementerian Hukum dan HAM	3 produk	Kota Makassar	640.000.000,00	PAD Prov, Sulsel		3 produk	935.000.000,00
TOTAL					64.356.141.761,00				79.302.718.103,00

BAB V

PENUTUP

Renja Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2022 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan/sub kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Penyusunan Renja-PD setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan Perangkat Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbangda Prov. Sulsel, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Catatan Penting

- a. Permusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja-PD Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2022 pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Sulawesi Selatan periode 2018-2023.
- b. Penyusunan Renja-PD Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2022 ini berpedoman pada Perubahan Renstra Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2018-2023 dan RKPD Prov. Sulsel Tahun 2022, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah Pelaksanaan dokumen Renja-PD Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Renja-PD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022 sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2022;
- b. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Prov. Sulsel. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Prov. Sulsel;
- c. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja-PD Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2022.

3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja-PD Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a) Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2022 mengacu pada nomenklatur yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- b) Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala (setiap triwulan) terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja-PD Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2022.

Dokumen perencanaan yang telah disusun sebaik apa pun tidak akan dirasakan manfaatnya bila tidak diimplementasikan dengan baik pula. Keberhasilan pelaksanaan Renja-PD ini tidak terlepas dari peran, tanggungjawab dan dukungan penuh berbagai pihak yang terkait demi tercapainya sasaran Bappelitbangda Prov. Sulsel dalam menopang keberhasilan terhadap program-program prioritas pembangunan.

Dengan disusunnya Renja-PD Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2022 ini diharapkan terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan, maka selanjutnya Renja-PD ini diharapkan menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun Anggaran 2022.

Makassar, 2021
Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
Plt. Kepala,

TTD
Ir. Andi Darmawan Bintang, M.DevPlg
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19670427 199303 1 015



RENJA-PD TAHUN 2022
BAPPELITBANGDA PROV. SULSEL

Jl. Urip Sumohardjo No. 269 Makassar 90231

Phone : (0411) 453486

Instagram : @bappelitbangdasulsel